

EFFECT OF BOARD OF DIRECTORS, INDEPENDENT COMMISSIONERS, AND COMMITTEE AUDITS ON FINANCIAL PERFORMANCE IN THE FOOD AND BEVERAGE SECTOR

Ika Prayanthi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Klabat
ikaprayanthi@unklab.ac.id

Christine Natalia Laurens

Bank Panin
christinenlaurens@yahoo.com

Abstract

The Purpose of this study is to examine whether there is an effect between the variables of the board of directors, independent commissioners, and audit committees on return on equity in the food and beverage sector listed on the Stock Exchange in 2013-2017. Through purposive sampling techniques, there are 12 numbers of food and beverage industry companies that are consistently listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The method used in this study is an associative method using multiple regression. Statistical test results found that the variable number of board of directors, the proportion of independent commissioners, and the audit committee simultaneously influence the return on equity. If seen each variable has a different magnitude of influence of financial performance. The number of directors has a significant negative effect on return on equity, the proportion of independent directors has a significant positive effect on return on equity, but the audit committee variables does not have a significant effect on return on equity

Keywords: Board of directors, independent commissioners, audit committee, and return on equity.

PENGARUH DEWAN DIREKSI, KOMISARIS INDEPENDEN, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara variabel dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit terhadap *return on equity* pada sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI tahun 2013 – 2017. Melalui teknik purposive sampling, terdapat 12 jumlah perusahaan industri makanan dan minuman yang konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan menggunakan regresi berganda. Hasil uji statistik mendapati bahwa variabel

jumlah dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan komite audit secara simultan berpengaruh terhadap *return on equity*. Jika dilihat masing-masing masing-masing variabel memiliki besaran pengaruh yang berbeda terhadap kinerja keuangan. Jumlah dewan direksi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *return on equity*, proporsi komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *return on equity*, tetapi variabel komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *return on equity*.

Kata Kunci: Dewan direksi, komisaris independen, komite audit, dan *return on equity*.

Pendahuluan

Isu “*Good Corporate Governance (GCG)*” pada awalnya kurang begitu dikenal sebelum negara-negara di dunia mengalami krisis keuangan akibat runtuhnya perusahaan-perusahaan besar pada awal abad ke dua puluh seperti Enron, Worldcom, Tyco, London & Commonwealth, Poly Peck, dan Maxwell (Pudiwan & Mayangsari, 2010). Selanjutnya dijelaskan bahwa keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan independen oleh Dewan Direksi.

Di Indonesia isu ini mengemuka setelah Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Lebih lanjut dikatakan bahwa krisis ini disebabkan karena adanya kegagalan penerapan *good corporate governance* (Tjhen, Saleh, & Stinjak, 2012). Mendukung hal tersebut Kaniawati (2002) menjelaskan bahwa krisis keuangan yang melanda Indonesia ini disebabkan karena adanya standar tata kelola perusahaan yang rendah dan praktek-praktek yang tidak sehat, baik dalam sektor ekonomi publik maupun korporasi, dimana hal ini ditandai dengan adanya pengurus bisnis yang tidak berlaku jujur, pemilik yang mencari untung jangka pendek, pengawas yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan aparat pemerintah yang ikut berpartisipasi dalam menunjang praktek-praktek bisnis yang tidak sehat. Kegagalan *good corporate governance* ini berdampak bagi bank-bank yang ada di Indonesia, antara lain BCA, Bank Lippo, Bank Bali dan bank-bank lain yang menimbulkan kerugian besar bagi investornya (Sitorus, 2012). Sejak saat itulah pemerintah maupun investor memberikan perhatian yang lebih dalam praktik GCG ini (Nuresa & Hadiprajitno, 2013).

Krisis keuangan seperti ini biasanya disebabkan oleh permasalahan yang terjadi antara *agent* dan *principal (agency problem)*. Seterusnya dijelaskan bahwa masalah keagenan timbul karena adanya kesenjangan kepentingan antara para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak manajemen sebagai agen sehingga memunculkan konflik kepentingan (Nuswandari, 2009). Untuk meminimalisir konflik demi kepentingan Direksi ini maka Komisaris Independen yang merupakan organ pengawas kebijakan Direksi, perlu dibantu oleh komite-komite yang dapat menjadi fasilitator, salah satunya yaitu Komite Audit (Pudiwan & Mayangsari, 2010). Dengan adanya proses pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit ini, maka diharapkan perusahaan dapat menciptakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Memperkuat pendapat tersebut, Gantjowati & Adi (2010) mengemukakan bahwa agar penyelenggaraan *corporate governance* dapat berjalan dengan baik, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan antara lain dengan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 mensyaratkan bahwa setiap perusahaan publik di Indonesia wajib membentuk Komite Audit dengan anggota minimal tiga orang yang diketuai oleh satu orang Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan

Dalam dunia bisnis saat ini, peranan GCG sedang menjadi pusat perhatian perusahaan-perusahaan dunia untuk menciptakan akuntabilitas laporan keuangan secara internasional (Azam, Usmani, & Abassi, 2011). Konsep GCG ini juga menjadi faktor utama bagi industri-industri yang ada di Indonesia untuk berkembang, termasuk sektor makanan dan minuman (Pertiwi & Pratama, 2012). Lebih lanjut dikatakan bahwa sektor makanan dan minuman memiliki saham yang banyak diminati oleh investor karena saham-saham ini tidak terpengaruh oleh pergerakan situasi ekonomi makro atau kondisi secara umum sehingga perusahaan tersebut mampu memberikan bagian keuntungan yang diberikan emiten kepada pemegang sahamnya.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara komponen GCG dalam hal ini Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan perusahaan. Azam, Usmani, dan Abassi (2011) menemukan adanya hubungan yang positif antara komponen GCG yakni jumlah Dewan Direksi, proporsi Komisaris Independen, dan jumlah Komite Audit dengan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Obiyo & Tobira (2011) yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah Dewan Direksi, proporsi Komisaris Independen dan jumlah Komite Audit terhadap *Return on Equity*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryati & Rahardjo (2013) yang tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara struktur *good corporate governance* dengan *Return on Equity* perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin membuktikan apakah faktor-faktor GCG yakni Dewan Direksi, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dalam hal ini diukur melalui *Return on Equity* pada sektor makanan dan minuman periode 2013-2017.

Telaah Pustaka

Teori Agensi

Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori agensi. Teori ini menjelaskan tentang benturan kepentingan antara prinsipal dan agen, sehingga diperlukan adanya mekanisme insentif untuk mendorong manajemen bertindak sesuai kepentingan pemilik (Adjani & Rahardja, 2013).

Good Corporate Governance (GCG)

Di Indonesia perhatian *corporate governance* mulai muncul ketika pada tahun 1997-1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang membuat keadaan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Lebih lanjut dikatakan keterpurukan ekonomi Indonesia ditandai dengan merosotnya angka nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga menyebabkan banyak investor asing yang tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia (Utama & Rohman, 2013). Adapun sumber masalah terjadinya krisis tersebut adalah karena lemahnya tata kelola perusahaan (*GCG*). Lebih lanjut dikatakan bahwa kelemahan implementasi *GCG* dapat dilihat dari minimnya keterbukaan perusahaan, termasuk keterbukaan dalam hal pelaporan kinerja keuangan, kewajiban kredit, pengelolaan perusahaan, kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai pengawas terhadap aktivitas manajemen dan kurangnya peran auditor dalam memberikan kontribusi terhadap sistem pengawasan keuangan perusahaan. Lebih lanjut lagi dikatakan sebagai akibat dari hal ini, maka perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa profit yang maksimal, tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan *stakeholders* (Djumahir, 2011).

Melihat hal tersebut maka penerapan GCG merupakan langkah maju dalam pengelolaan perusahaan. Riswandi (2006) mengatakan bahwa dengan menerapkan GCG mengandung arti bahwa perusahaan tersebut dikelola dengan tata kelola yang memberikan jaminan berlangsungnya sistem dan proses pengambilan keputusan organ perusahaan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, bertanggung jawab dan akuntabel. Lebih lanjut lagi dikatakan bahwa para manajer dana di Asia akan membayar 26%-30% lebih untuk saham-saham perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik ketimbang untuk saham-saham perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang meragukan.

Definisi GCG

GCG adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjalin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada “*stakeholders*” (Paranandhi & Haryanto, 2013). Hal senada juga dipaparkan oleh Haryati & Rahardjo (2013) bahwa GCG merupakan suatu tata kelola perusahaan yang dapat menjelaskan hubungan antara berbagai pihak di dalam perusahaan yang kemudian dapat menentukan arah kinerja perusahaan. Putri (2012) juga mengatakan bahwa GCG adalah sistem pengelolaan perusahaan baik dalam mengendalikan maupun mengarahkan perusahaan untuk mencapai suatu sistem tata kelola yang baik demi memenuhi tujuan perusahaan.

Mekanisme GCG

Sistem GCG pada perusahaan dibagi menjadi dua bagian yaitu mekanisme *internal governance* dan mekanisme *external governance* yang sifatnya beragam tergantung lingkungan tertentu yang dianjurkan (Charlie Weir et al dalam Wulandari, 2006). Mekanisme internal termasuk penyebaran struktur kepemilikan, adanya Dewan Direksi, pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu. Lebih lanjut dikatakan mekanisme eksternal termasuk adanya pasar *takeover* yang aktif, infrastruktur legal hubungan antar *shareholder*, dan pasar modal yang establish (Djumahir, 2011).

Prinsip-Prinsip GCG

Djumahir (2011) dalam jurnalnya mengenai “Pengaruh GCG dan Kepemilikan Manajemen terhadap Kinerja Keuangan” memaparkan empat prinsip-prinsip pokok yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya praktik GCG, yakni:

1. *Transparansi (Transparency)*

Kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Adapun informasi tersebut harus jelas, konsisten, dapat diperbandingkan dan menggunakan standar akuntansi yang diterima di seluruh dunia, agar bisa bernilai di pasar modal global. Dampak transparansi adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat memperhitungkan dampak resiko bertransaksi dengan perusahaan.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas didasarkan pada sistem *internal checks and balances* yang mencakup praktik audit yang sehat. Akuntabilitas juga dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris, dan

Direksi. Praktik audit yang sehat dan independen mutlak diperlukan untuk menunjang akuntabilitas perusahaan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengefektifkan Komite Audit.

3. Keadilan (*Fairness*)

Fairness meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham untuk melindungi kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan terhadap pemegang saham mayoritas, dari kecurangan seperti praktek insider yang merugikan atau dari keputusan Direksi atau pemegang saham mayoritas yang merugikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan.

4. Responsibilitas (*Responsibility*)

Dalam hal ini perusahaan bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan yang mengatur masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha.

Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah mereka yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan (Septiputri & Mutmainah, 2013). Adanya Dewan Direksi sangatlah penting dalam membangun *GCG*, karena keberadaannya menentukan kinerja perusahaan (Hanifah & Purwanto, 2013).

Dewan Direksi adalah mereka yang bertanggung jawab penuh dalam perusahaan. Dewan Direksi sangatlah berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dalam hal mengelola informasi yang ada di perusahaan untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dengan hal ini, maka tata kelola perusahaan sangatlah diperlukan untuk membatasi kebijakan Dewan Direksi agar tidak menyimpang dari tujuan perusahaan (Noviardhi & Hadiprajitno, 2013). Menurut Byrd & Hickman (1992) peningkatan ukuran dan diversitas dari Dewan Direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumberdaya. Adapun ketentuan jumlah minimal Dewan Direksi yang disyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang harus dilaksanakan yaitu minimal 2 orang.

Tanggung Jawab Dewan Direksi

Dewan Direksi dan dewan komisaris mempunyai tanggung jawab bersama dalam menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang (Widianingsih, 2011) yang tercermin pada:

1. terlaksananya dengan baik kontrol internal dan manajemen risiko;
2. tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi pemegang saham;
3. terlindungnya kepentingan pemangku kepentingan secara wajar;
4. terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi.

Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik (Hardiningsih, 2010). Adapun

Komisaris Independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung (Surya dan Yustiavandana dalam Zulaikha, 2013). Senada dengan pengertian tersebut, Septiputri & Mutmainah (2013) juga mendefinisikan Komisaris Independen sebagai anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pegawai atau orang yang berurusan langsung dengan perusahaan tersebut, dan tidak mewakili pemegang saham mayoritas. Mereka diangkat karena pengalamannya dianggap berguna bagi perusahaan tersebut untuk mengawasi dewan komisaris dan mengawasi bagaimana perusahaan dijalankan.

Peran Komisaris Independen

Menurut Hapsoro (2012), Keberadaan Komisaris Independen seharusnya : 1) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali, 2) Tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya, 3) Tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi, 4) Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, serta 5) Diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat umum pemegang saham.

Sesuai dengan uraian di atas lebih lanjut dijelaskan bahwa keberadaan Komisaris Independen terutama dimaksudkan untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas yang diharapkan benar-benar dapat mewakili kepentingan pemegang saham dalam rangka mendorong agar kinerja perusahaan menjadi lebih baik.

Proporsi Komisaris Independen

Menurut Peraturan No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas, dalam rangka penyelenggaraan GCG perusahaan tercatat wajib memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan Pemegang Saham Pengendali dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh komisaris (Hardiningsih, 2010).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ariningtika & Kiswara (2013) dimana keberadaan Komisaris Independen juga telah di atur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000 III 1.4 yang menyebutkan bahwa persyaratan jumlah minimal Komisaris Independen adalah 30% (tiga puluh persen) dari seluruh anggota dewan komisaris. Lebih lanjut dijelaskan bahwa semakin besar proporsi dewan Komisaris Independen yang dimiliki perusahaan diharapkan kinerja dewan komisaris mampu melakukan pengawasan yang semakin objektif dan mampu melindungi kepentingan perusahaan dalam hal ini mendorong peningkatan pengungkapan lingkungan perusahaan.

Komite Audit

Komite Audit adalah suatu komite yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dimana anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris (Widjaja & Maghviroh, 2011). Senada dengan pengertian tersebut, Elyanto & Syafruddin (2013) juga menjelaskan pengertian yang sama tentang Komite Audit yakni Komite Audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yang berasal dari luar perusahaan dan seorang Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit.

Membangun Komite Audit Yang Efektif

Membangun peran Komite Audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip-prinsip *GCG* secara keseluruhan di suatu perusahaan, dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan (Hanifah, 2006).

Hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Komite Audit harus independen, dimulai dengan dipersyaratkannya Komisaris Independen sebagai ketua Komite Audit. Di samping itu anggota Komite Audit lainnya juga harus benar-benar independen terhadap perusahaan. Nama anggota Komite Audit harus diumumkan ke *public* luas sehingga terjadi kontrol sosial mengenai independennya.
2. Komite Audit harus transparan, dimulai dengan keharusan adanya agenda program kerja tahunan tertulis dari Komite Audit yang kemudian didukung dengan keteraturan rapat Komite Audit yang menghasilkan risalah rapat tertulis.
3. Komite Audit harus memiliki akuntabilitas tinggi, dimulai dengan pemenuhan persyaratan *generic* dari anggota Komite Audit, yang secara *team* setidaknya memiliki kompetensi dan pengalaman sangat cukup di bidang berikut:
 - a. Audit, akuntansi dan keuangan: pemahaman mendalam konsep dan praktek mengenai *financial engineering, corporate finance, internal control, risk management* dan *auditing* serta *fraud examination*.
 - b. Peraturan dan perundangan: pemahaman mendalam konsep dan praktek peraturan dan perundangan (termasuk tetapi tidak terbatas) mengenai Pasar Modal, Pasar Uang, Pasar Komoditi Berjangka, Bursa Saham, Undang-Undang PT, BUMN/BUMD dan *GCG*.
 - c. Proses bisnis industri terkait: pemahaman konsep dan praktek bisnis industri terkait, misal Industri Perbankan, Industri Tambang dan Industri Produk Konsumen.
Untuk lebih efektif, Komite Audit harus memperoleh masukan dari sub komite lainnya terutama komite *risk management* mengenai identifikasi dan penanganan resiko penting perusahaan. Disamping itu, Komite Audit juga harus komunikatif terutama dengan auditor eksternal dan internal audit, sehingga mereka memiliki jalur cepat dalam mengkomunikasikan hal-hal yang signifikan yang perlu diketahui oleh Komite Audit, terutama dalam hal-hal terjadinya penyimpangan yang kritis di perusahaan.
4. Komite Audit harus bersikap adil, dalam pengambilan keputusan Komite Audit harus benar-benar melandaskannya pada sikap adil kepada semua pihak, terutama dalam hal penelaahan terhadap kesalahan asumsi maupun pelanggaran terhadap resolusi Dewan Direksi. Oleh karenanya, semua keputusan harus didasarkan pada fakta dan dokumen penunjang cukup. Jika diperlukan, Komite Audit dapat meminta bantuan pihak luar untuk mengadakan penyidikan hal-hal tertentu.
5. Komite Audit harus memiliki *audit committee charter (term of reference)* sebagai rujukan internal tentang bagaimana sebaiknya mengatur diri sendiri sehingga tujuan terbentuknya Komite Audit di perusahaan tercapai. *Audit committee charter (term of reference)* mendefinisikan secara jelas peran dan tanggung jawab Komite Audit serta kerangka kerja fungsionalnya.

Peran dan Tanggung jawab Komite Audit

Lebih jelasnya lagi Hanifah (2006) dalam jurnal bisnis dan ipteknya memaparkan peran dan tanggungjawab Komite Audit yang dengan jelas harus tercantum pada *audit committee charter (term of reference)* yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaporan Laporan Keuangan (*Financial Reporting*)

Dalam pelaporan keuangan, peranan dan tanggungjawab Komite Audit adalah:

- a. Melakukan pengawasan proses pembuatan laporan keuangan, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap standar dan *policy* akuntansi yang berlaku.
- b. Melakukan *review* atas laporan-laporan keuangan terhadap standar dan *policy* akuntansi yang berlaku dan konsisten terhadap informasi yang diketahui oleh anggota Komite Audit.
- c. Melakukan pengawasan audit eksternal dan melakukan *assesment* mengenai kualitas jasa audit yang dilakukan, dan mengenai kepatutan *fees* yang dibebankan oleh auditor eksternal.

2. Manajemen Resiko dan Kontrol Risk (*Risk and Control Management*)

Dalam hal manajemen resiko dan kontrol, peran dan tanggungjawab Komite Audit adalah:

- a. Melakukan pengawasan proses manajemen resiko dan pengendalian, termasuk pengidentifikasian dari resiko-resiko dan evaluasi dari pengendalian yang dapat memperkecil baik kemungkinan terjadinya maupun dampak dari resiko-resiko tersebut.
- b. Melakukan pengawasan terhadap cakupan audit internal dan audit eksternal dalam rangka memastikan bahwa semua resiko utama dan bentuk pengendaliannya telah dipertimbangkan oleh para auditor.
- c. Meyakini bahwa manajemen telah melaksanakan pengendalian resiko-resiko sesuai dengan rekomendasi dari para auditor, internal dan eksternal.

3. Corporate Governance

Dalam rangka mewujudkan *GCG*, Komite Audit bertanggungjawab memberikan kepastian bahwa perusahaan telah melaksanakan secara layak seluruh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap benturan kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya. Termasuk peran dan tanggungjawab Komite Audit adalah:

- a. Pengawasan terhadap proses penerapan *GCG*.
- b. Memastikan bahwa manajemen puncak secara aktif mensosialisasikan budaya *corporate governance*.
- c. Memonitor bahwa code of conduct telah dilaksanakan secara konsekuen.
- d. Memahami semua pokok persoalan maupun issues yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja financial maupun non finansial dari perusahaan.
- e. Memantau bahwa perusahaan mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- f. Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis setiap enam bulan sekali mengenai hasil evaluasi pelaksanaan *corporate governance* di perusahaan dan memberikan laporan bila terdapat penyimpangan yang serius.

Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

Adapun persyaratan keanggotaan Komite Audit sesuai Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut (Hanifah, 2006):

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- f. Bukan merupakan Karyawan Kunci Emiten atau Perusahaan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.

Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan kemampuan individu atau organisasi dalam mewujudkan anggaran/rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana baik buruknya kinerja tergantung seberapa besar pencapaian/realisasi dibandingkan dengan anggaran/rencana yang telah ditetapkan. Dengan kata lain kinerja keuangan merupakan penilaian yang menggunakan indikator keuangan (Sudrajat & Sukmasari, 2011).

Kinerja keuangan pada umumnya didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan atas pelaksanaan fungsi-fungsi keuangan dan hal ini sangat penting, baik bagi investor maupun bagi perusahaan yang bersangkutan (Noviawan & Septiani, 2013). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pentingnya penilaian prestasi kinerja perusahaan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan telah memicu pemikiran para pemimpin perusahaan bahwa mengelola suatu perusahaan di era modern dengan perkembangan teknologi yang pesat menjadi hal yang sangat kompleks.

Kinerja Keuangan mengindikasikan apakah strategi perusahaan, implementasi strategi, dan segala inisiatif perusahaan memperbaiki laba perusahaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa pengukuran kinerja mencerminkan pengukuran hasil atas keputusan strategis, operasi dan pembiayaan dalam suatu perusahaan (Hamidu, 2013).

Analisis Kinerja Keuangan

Analisa kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis laporan keuangan, dimana data pokok sebagai input dalam analisis ini adalah neraca dan laporan laba rugi (Orniati, 2009). Lebih lanjut dijelaskan bahwa analisis laporan keuangan memungkinkan manajer keuangan

dan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dengan cepat, karena penyajian rasio-rasio keuangan akan menunjukkan kondisi sehat tidaknya suatu perusahaan.

Pada umumnya analisis terhadap rasio merupakan langkah awal dalam analisis keuangan guna menilai prestasi dan kondisi keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio bermanfaat bila diinterpretasikan dalam perbandingan dengan 1) rasio tahun sebelumnya, 2) standar yang ditentukan sebelumnya, 3) rasio pesaing (Dewi & Evi, 2012).

Jenis – jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen beragam. Menurut Kasmir (2010) jenis – jenis rasio keuangan, yaitu:

1. Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar, rasio sangat lancar, rasio kas, rasio perputaran kas, dan *inventory to net working capital*.
2. Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio solvabilitas terdiri dari *debt to assets ratio (debt ratio)*, *debt to equity ratio*, *long term debt to equity ratio*, *times interest earned*, dan *fixed charge coverage*.
3. Rasio Aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan (penjualan, sediaan, penagihan utang, dan lainnya) atau untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari – hari. Rasio aktivitas terdiri dari perputaran piutang, hari rata-rata penagihan piutang, perputaran sediaan, hari rata-rata penagihan sediaan, perputaran modal kerja, perputaran aktiva tetap, dan perputaran aktiva.
4. Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio profitabilitas terdiri dari profit margin (profit margin on sales), return on investment, Return on Equity, dan laba per lembar saham.
5. Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.
6. Rasio Penilaian yaitu rasio yang memberikan ukuran kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar usahanya di atas biaya investasi seperti rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku.

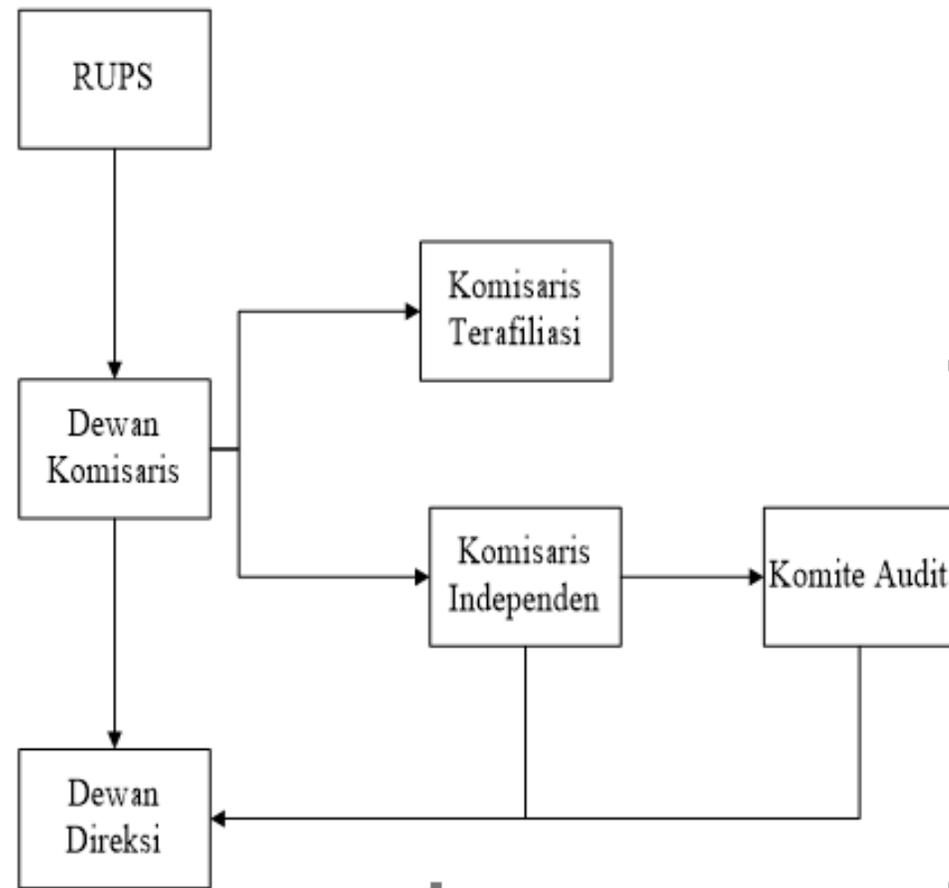
Return on Equity

Return on Equity ratio adalah salah satu ratio profitabilitas yang sangat penting bagi *common stockholder* karena rasio ini mengindikasikan tingkat pengembalian yang telah diperoleh pada modal yang disediakan oleh pemilik setelah memperhitungkan pembayaran kepada semua pemasok modal lainnya (Reilly & Brown, 2000). Lebih jelasnya Reilly & Brown (2000) menjelaskan rumus perhitungan *Return on Equity* (ROE) adalah *Net Income/Total Equity*.

Return on Equity (ROE) menerangkan laba bersih yang dihasilkan untuk setiap ekuitas. Semakin besar ROE menandakan bahwa perusahaan semakin baik dalam mensejahterakan para pemegang saham prioritas yang dihasilkan dari setiap lembar saham. Rasio ini juga dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang perusahaan, apabila proporsi hutang semakin besar maka rasio ini juga akan semakin besar (Lambey & Jullie, 2012).

Komponen GCG

Secara garis besar jika dilihat GCG dari sudut pandang pengawasan terhadap dewan direksi dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1
Komponen GCG

Sumber: Pengelola data (2020)

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap ROE

Obiyo & Tobira (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “*Corporate Governance and Firm Performance in Nigeria*” menyimpulkan bahwa struktur *corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun salah satu yang menjadi ukuran dalam penelitian ini adalah Dewan Direksi, dimana Dewan Direksi diukur berdasarkan jumlah dan kemudian diuji secara parsial terhadap *Return on Equity*. Sejalan dengan penelitian tersebut, Septiputri & Mutmainah (2013) juga menyimpulkan hal yang sama.

Namun bertentangan dengan penelitian tersebut, Jati (2009), Novrianti & Armas (2012), dan Ujiyantho (2007) mendapati bahwa ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity* perusahaan. Hal ini pun juga didukung oleh beberapa teori kepemimpinan diantaranya teori perilaku dan teori kontijensi.

Ha₁: Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah dewan direksi terhadap *Return on Equity*.*Pengaruh Komisaris Independen Terhadap ROE*

Djumahir (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance dan Kepemilikan Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan”, mendapati bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity* perusahaan. Penelitian tersebut juga didukung oleh beberapa penelitian serupa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Septiputri & Mutmainah (2013), Azam, Usmani, & Abassi (2011), Santoso (2012), Nugrahani & Nugroho (2010), dan Sudantoko (2012).

Penelitian yang berbeda didapati oleh Puspitasari & Ernawati (2010), dimana dalam jurnal penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa proporsi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity* perusahaan. Hal ini juga didukung oleh kesimpulan yang didapati oleh Novrianti & Armas (2012), dimana proposi Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*.

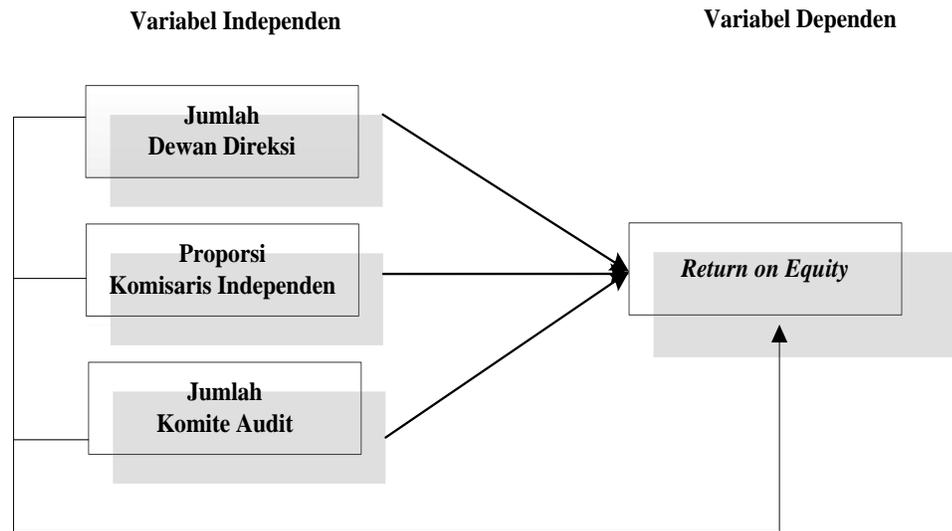
Ha₂: Terdapat pengaruh yang signifikan antara proporsi Komisaris Independen terhadap *Return on Equity*.*Pengaruh Komite Audit Terhadap ROE*

Bouaziz (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “*The Impact of Presence of Audit Committeess on the Financial Performance of Tunisian Companies*” menarik kesimpulan bahwa ukuran Komite Audit yang diukur berdasarkan jumlah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Equity* perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sudantoko (2012) yang menguji secara parsial pengaruh Komite Audit terhadap *Return on Equity*, dan didapati bahwa Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity*. Adapun penelitian-penelitian ini juga didukung oleh penelitian-penelitian serupa seperti yang dilakukan oleh Obiyo & Tobira (2011).

Kesimpulan yang berbeda didapati oleh Haryati & Rahardjo (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh struktur *corporate governance* terhadap kinerja keuangan, dimana struktur tersebut salah satunya diukur berdasarkan jumlah Komite Audit. Dari penelitian tersebut didapati kesimpulan bahwa ukuran Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity*. Hal ini juga didukung oleh penelitian-penelitian serupa yang dilakukan Novrianti & Armas (2012) dan Jati (2009).

Ha₃: Terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah komite audit terhadap *Return on Equity*.

Kerangka Konseptual



Gambar 2
Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber: Pengelola data (2020)

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah jumlah dewan direksi, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Return on Equity*. Variabel Independen dalam penelitian adalah jumlah dewan direksi, proporsi komisari independen, dan jumlah komite audit sedangkan variabel dependen adalah *Return on Equity*.

Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dalam hal ini adalah analisis regresi yakni bertujuan untuk mengemukakan ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variable dependen. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah Dewan Direksi, proporsi Komisaris Independen, dan jumlah Komite Audit terhadap *Return on Equity* pada sektor makanan dan minuman.

Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah semua perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2017. Untuk pemilihan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling*.

Adapun kriteria sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar berturut –turut pada tahun 2013-2017.
2. Perusahaan sektor makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2013 – 2017.

Dari 17 perusahaan yang dijadikan populasi terdapat 12 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel. Daftar perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1
Sampel Penelitian

No.	Kode Per.	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk.
3	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
4	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
5	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
6	MYOR	Mayora Indah Tbk.
7	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk.
8	PSDN	Prasidha Aneka Niaga Tbk.
9	SKLT	Sekar Laut Tbk.
10	ROTI	Nipon Indosari Corpindo Tbk
11	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
12	ULTJ	Ultra Jaya Milk Ind. Tbk.

Prosedur Pengumpulan Data

Daftar perusahaan sektor makanan dan minuman yang sesuai dengan kriteria pemilihan sampel diperoleh dari FACT BOOK 2013-2017 yang diunduh dari situs resmi BEI. Sedangkan variabel data yakni Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, net income dan total *equity* diperoleh dari laporan keuangan masing-masing perusahaan yang diunduh dari situs resmi BEI.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik regresi merupakan uji prasyarat jika akan menggunakan analisis regresi linier (Priyatno, 2013). Lebih lanjut dikatakan beberapa uji asumsi tersebut jika dilanggar maka hasil analisis regresi menjadi tidak valid atau *bias*. Adapun hasil uji asumsi menunjukkan hasil dimana data dalam penelitian ini memenuhi uji prasyarat sehingga dapat dilanjutkan untuk digunakan dalam pengolahan data untuk menjawab hipotesis. Untuk lebih jelasnya hasil uji asumsi klasik diuraikan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas residual digunakan untuk menguji apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji normalitas residual pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		12
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.13691761
Most Extreme Differences	Absolute	.195
	Positive	.195
	Negative	-.159
Test Statistic		.195
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan Tabel 2 nilai signifikansi adalah 0.200 lebih dari 0.05 yang artinya bahwa data residual pada penelitian ini terdistribusi normal. Penelitian yang baik adalah penelitian dimana data residual terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana di antara variabel bebas dalam model regresi terdapat korelasi yang signifikan (Santoso, 2012). Lebih lanjut dijelaskan bahwa model regresi yang baik tidak mengandung multikolinieritas. Multikolinieritas dapat diketahui dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (Priyatno, 2013). Lebih jelasnya dijelaskan apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* tidak lebih kecil dari 0.10 maka tidak terdapat gejala multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Jumlah Dewan Direksi(X1)	0.875	1.143
Proporsi Komisaris Independen(X2)	0.862	1.160
Jumlah Komite Audit(X3)	0.982	1.018

a. Dependent Variable: Return on Equity(Y)

Dari hasil uji multikolinearitas seperti terlihat pada Tabel 1.3 menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1.

Rumus Statistik

Untuk melihat pengaruh jumlah Dewan Direksi, proporsi Komisaris Independen, dan jumlah Komite Audit terhadap *Return on Equity* maka digunakanlah regresi berganda.

Rumus statistik untuk regresi berganda adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

Keterangan

Y	= variabel dependen
β_0	= konstansa
β_1	= koefisien regresi variabel independen 1
X_1	= variabel independen 1
B_2	= koefisien regresi variabel independen 2
X_2	= variabel independen 2
B_3	= koefisien regresi variabel independen 3
X_3	= variabel independen 3
ε	= <i>random error</i>

Persamaan regresi berganda penelitian ini adalah:

$$\text{ROE} = \beta_0 + \beta_1 \text{JDD} + \beta_2 \text{PKI} + \beta_3 \text{JKA} + \varepsilon$$

Adapun toleransi *error* yang ditetapkan adalah 0,05.

Analisis Data

Supaya data yang telah dikumpulkan dapat bermanfaat, maka data harus diolah dan dianalisis sehingga dapat digunakan untuk menginterpretasikan, dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Kriteria pengambilan keputusan untuk uji regresi berganda sehubungan dengan hipotesis H_{A1} , H_{A2} , H_{A3} adalah jika diperoleh angka signifikan atau $p\text{-value} \leq 0.05$ maka H_A diterima yang artinya secara bersamaan variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika diperoleh angka signifikan atau $p\text{-value} > 0.05$ maka H_A ditolak yang artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya pada tabel t akan dilihat besaran pengaruh untuk masing-masing variabel. Variabel manakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Data Deskriptif dan Pengujian Hipotesis

Tabel 4
Data Deskripsi Penelitian

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Return on Equity(Y)	.2242	.30237	12
Jumlah Dewan Direksi(X1)	5.1833	2.11395	12
Proporsi Komisaris Independen(X2)	.3708	.08393	12
Jumlah Komite Audit(X3)	3.0500	.34245	12

Apakah terdapat pengaruh antara jumlah Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, dan jumlah komite audit terhadap *Return on Equity* perusahaan?

Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 berikut ini:

Tabel 5
Tabel Besaran Kontribusi Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.892 ^a	.795	.718	.16055

a. Predictors: (Constant), Jumlah Komite Audit(X3), Jumlah Dewan Direksi(X1), Proporsi Komisaris Independen(X2)

b. Dependent Variable: Return on Equity(Y)

Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,795 atau 79,5% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 6
Tabel ANOVA
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.799	3	.266	10.339	.004 ^b
	Residual	.206	8	.026		
	Total	1.006	11			

a. Dependent Variable: Return on Equity(Y)

b. Predictors: (Constant), Jumlah Komite Audit(X3), Jumlah Dewan Direksi(X1), Proporsi Komisaris Independen(X2)

Nilai signifikan pada tabel 6 menunjukkan angka 0,004 lebih kecil dari alpha 0,05 yang artinya terima H_a dan tolak H_0 . Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, dan Jumlah Komite Audit terhadap *Return on Equity* perusahaan. Untuk menjawab hipotesis secara mendetail apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dapat dilihat tabel 1.7 dan penjelasan detail berikut ini:

Tabel 7
Tabel Signifikansi Uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-0.997	0.510		-1.952	0.087
Jumlah Dewan Direksi(X1)	-0.068	0.024	-0.473	-2.760	0.025
Proporsi Komisaris Independen(X2)	3.418	0.621	0.949	5.501	0.001
Jumlah Komite Audit(X3)	0.100	0.143	0.113	0.698	0.505

a. Dependent Variable: Return on Equity(Y)

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah Dewan Direksi terhadap Return on Equity perusahaan?

Tabel 1.7 menunjukkan nilai signifikan 0,025 lebih kecil dari alpha 0,05 artinya H_a diterima. Jumlah Dewan Direksi (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan tetapi arahnya negatif terhadap Return on Equity. Hal ini berarti jika jumlah dewan direksi bertambah maka akan menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap *return on equity*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang pernah dilakukan oleh Septiputri & Mutmainah (2013) dan Obiyo & Tobira (2011). Mereka mendapati bahwa jumlah Dewan Direksi berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity* perusahaan. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya penelitian yang dibuat oleh Jati

(2009), Novrianti & Armas (2012), dan Ujijantho (2007) yang mendapati bahwa jumlah Dewan Direksi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity* perusahaan. Ujijantho (2007) mendapati bahwa ukuran Dewan Direksi tidak dilihat dari besar kecilnya Dewan Direksi akan tetapi bergantung dari norma dan kepercayaan yang diterima dalam organisasi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Septiputri & Mutmainah (2013) mendapati bahwa peningkatan ukuran Dewan Direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* sehingga modal saham akan bertambah dan pengelolaan yang baik akan meningkatkan keuntungan. Dengan demikian ukuran Dewan Direksi yang lebih banyak dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya perusahaan lebih efektif dan baik sehingga dapat menaikkan profitabilitas.

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah proporsi Komisaris independent terhadap Return on Equity perusahaan?

Namun demikian ada beberapa hasil penelitian yang kontradiksi dengan penelitian-penelitian di atas seperti yang pernah dilakukan oleh Puspitasari & Ernawati (2010) dan Novrianti & Armas (2012). Mereka menemukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara proporsi Komisaris Independen terhadap *Return on Equity* perusahaan. Lebih lanjut Novrianti & Armas (2012) menjelaskan beberapa alasan mengapa Komisaris Independen yang merupakan salah satu indikator dari GCG tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan, diantaranya: (1). rendahnya kesadaran emiten menerapkan GCG. Mereka menerapkan bukan karena kebutuhan, namun karena kepatuhan. (2). Manajemen perusahaan belum melihat adanya dampak finansial secara langsung. (3). Unsur budaya yang berkembang dilingkungan usaha nasional belum menunjang perkembangan penerapan GCG. Misalnya, ada perusahaan yang masih beranggapan bahwa transparansi berarti membuka rahasia dagang dan bisa mengancam daya saing. (4). Pasar Indonesia belum memperhatikan penerapan GCG di perusahaan atau penerapan *corporate governance* tidak bisa secara langsung atau jangka pendek tetapi membutuhkan waktu dan informasi tentang penerapan *corporate governance* dalam jangka waktu beberapa tahun.

Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah komite audit terhadap Return on Equity perusahaan?

Nilai signifikan pada tabel 1.7 menunjukkan angka 0,505 dimana lebih besar dari 0,05 artinya tolak H_0 . Variabel jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *return on equity* perusahaan.

Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Jati (2009), Haryati & Rahardjo (2013), dan Novrianti & Armas (2012) yang menemukan bahwa variabel Komite Audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur berdasarkan *Return on Equity*.

Tabel 7 menunjukkan nilai signifikan adalah 0,001 lebih kecil dari alpha 0,05 artinya terima H_0 . Proporsi komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *return on equity* perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang pernah dibuat oleh beberapa peneliti diantaranya Septiputri & Mutmainah (2013), Azam, Usmani, Abassi (2011), Djumahir (2011), Nugrahani & Nugroho (2010), dan Sudantoko (2012) yang mendapati bahwa proporsi Komisaris Independen berpengaruh secara signifikan terhadap *Return on Equity* perusahaan. Lebih jelasnya lagi Fama dan Jansen dalam Santoso (2012) menjelaskan bahwa komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dewan komisaris dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Dengan demikian, semakin besar jumlah Komisaris Independen, maka semakin tinggi independensi yang ada dalam dewan komisaris,

sehingga pengawasan yang dilakukan akan lebih obyektif terhadap pengelolaan oleh manajemen yang dapat menurunkan profitabilitas lebih dapat diminimalisir, sehingga profitabilitas akan lebih meningkat.

Hasil penelitian di atas diperkuat oleh Hanifah (2006) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Komite Audit adalah kewenangan yang secara statuta diberikan kepada komite, independensi serta sikap dan tanggungjawab anggota komite. Dengan adanya eksistensi dari faktor-faktor ini, peran Komite Audit dalam perusahaan secara maksimal diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kinerja perusahaan khususnya dalam pengimplementasian *GCG*. Lebih jelasnya lagi Novianawati & Septiani (2013) dan Chandra (2013) menyatakan bahwa ukuran Komite Audit dalam perusahaan yang telah diatur oleh Peraturan Bapepam membuat perusahaan hanya sebatas menjalankan formalitas dalam menaati peraturan tentang jumlah minimal Komite Audit dalam perusahaan yaitu tiga orang. Formalitas dalam menaati peraturan tentang jumlah Komite Audit ini menyebabkan efektivitas Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi kurang baik.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yakni:

- a. Jumlah Dewan Direksi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *Return on Equity* perusahaan.
- b. Proporsi Komisaris Independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Return on Equity* perusahaan.
- c. Jumlah Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Equity* perusahaan.

Saran

- a. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan komponen-komponen *good corporate governance* yang lain selain ketiga variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini untuk dijadikan variabel penelitian seperti Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial.
- b. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan jumlah sampel yang tidak hanya terbatas pada perusahaan makanan dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- c. Bagi investor sebaiknya sebelum mengambil keputusan untuk menanamkan dananya yang berupa saham pada suatu perusahaan, sebaiknya harus memperhatikan mekanisme *corporate governance* perusahaan tersebut bahwa apakah dalam perusahaan tersebut telah terciptanya *good corporate governance* atau belum.

Daftar Pustaka

- Adjani, E. D., & Rahardja, S. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Pemberian Opini Audit Going Concern oleh Auditor Independen (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2 (2), 1-11.

- Ariningtika, P., & Kiswara, E. (2013). Pengaruh Praktik Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Terhadap Pengungkapan Lingkungan Perusahaan. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 2 (2), 1-11.
- Azam, M., Usmani, S., & Abassi, Z. (2011). The Impact of Corporate Governance on Firm's Performance: Evidence from Oil and Gas Sector of Pakistan. *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* , 5 (12), 2978-2983.
- Bouaziz, Z. (2012). The Impact of the Presence of Audit Committees on the Financial Performance of Tunisian Companies. *International Journal of Management & Business Studies* , 2 (4).
- Byrd, J., & Hickman, K. (1992). Do Outside Directors Monitor Managers? Evidence from Tender and Bids. *Journal of Financial Economics* , 32, 192-222.
- Chandra, F. L. (2013). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Opini Audit Mengenai Going Concern pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2011. *Jurnal Ilmiah Universitas Surabaya* , 2 (1), 1-18.
- Dewi, A. K., & Evi, Y. (2012). Kinerja Laporan Keuangan untuk Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja. *Jurnal Ilmiah* , 6 (1), 1-16.
- Djumahir. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kepemilikan Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Aplikasi Manajemen* , 9 (1), 20-28.
- Elyanto, A. A., & Syafruddin, M. (2013). Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 2 (2), 1-14.
- Gantuwati, E., & Adi, N. D. (2010). Pengaruh Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Pengurangan Asimetri Informasi Disekitar Pengumuman Laba. *Jurnal Siasat Bisnis* , 13 (3), 253-265.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic Econometric* (Fourth Edition. International Edition ed.). New York: McGraw Hill Companies.
- Hamidu, N. P. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perbankan Di BEI. *Jurnal EMBA* , 1 (3), 711-721.
- Hanani, F., & Aryani, Y. A. (2011). Pengaruh Gender Dewan Komisaris, Gender Dewan Direksi, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* , 14 (1), 7-20.
- Hanifah. (2006). Eksistensi Dan Peran Komite Audit Dalam Implementasi Good Corporate Governance. *Jurnal Bisnis Dan Iptek* , 9 (4), 43-59.
- Hanifah, O. E., & Purwanto, A. (2013). Pengaruh Struktur Corporate Governance Dan Financial Indicators Terhadap Kondisi Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting* , 2 (2), 1-15.

- Hapsoro, D. (2012). Pengaruh Kualitas Corporate Governance, Kualitas Audit, dan Earnings Management Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* , 6 (3), 203-214.
- Hardiningsih, P. (2010). Pengaruh Independensi, Corporate Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Kajian Akuntansi* , 2 (1), 61-76.
- Haryati, R., & Rahardjo, S. N. (2013). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kinerja Lingkungan, Dan Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 2 (2), 1-15.
- Jati, F. (2009). Pengaruh Struktur Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi-Universitas Gunadarma* , 1-11.
- Kaniawati, N. (2002). Good Corporate Governance dan Hambatan-Hambatan yang Dihadapi oleh Perusahaan Untuk Menerapkannya. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi* , 4 (2), 54-66.
- Kasmir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Lambey, R., & Jullie, S. (2012). Analisis Pengaruh Rasio CR, DER, ROA, ROE, dan EPS Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Food & Beverages Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing* , 3 (2), 67-79.
- Noviardhi, M. T., & Hadiprajitno, B. (2013). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 2 (2), 1-9.
- Noviawan, R. A., & Septiani, A. (2013). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 2 (3), 1-10.
- Novrianti, V., & Armas, R. (2012). Pengaruh Corporate Sosial Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi* , 1 (1), 1-11.
- Nugrahani, T. S., & Nugroho, F. A. (2010). Pengaruh Komisaris Independen dan Pengungkapan Sukarela terhadap Kinerja Perusahaan. *Karisma* , 4 (2), 132-141.
- Nuresa, A., & Hadiprajitno, B. (2013). Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 2 (2), 1-10.
- Nuswandari, C. (2009). Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* , 16 (2), 70-84.
- Obiyo, O. C., & Tobira, L. L. (2011). Corporate Governance and Firm Performance in Nigeria. *International Journal Of Research In Commerce & Management* , 2 (8), 19-24.

- Okpala, K. E. (2012). Audit Commitee and Integrity of Financial Statement : A Preventive Mechanism for Corporate Failure. *Australian Journal of Business and Management Research* , 2 (08), 32-40.
- Orniati, Y. (2009). Laporan Keuangan sebagai Alat untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis* (3), 206-213.
- Paranandhi, C., & Haryanto. (2013). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Risiko Kredit Perusahaan Non Keuangan. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 2 (2), 1-10.
- Pertiwi, T. K., & Pratama, F. M. (2012). Pengaruh Kinerja Keuangan, Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* , 14 (2), 118-127.
- Priyatno. (2013). *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Jakarta: Mediakom.
- Pudiwan, I., & Mayangsari, S. (2010). Partisipasi Komite Audit dan Komite Manajemen Resiko Selaku Organ Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* , 10 (2), 61-77.
- Purnama, N. (2000). Kepemimpinan Organisasi Masa Depan Konsep dan Strategi Keefektifan. *Jurnal Siasat Bisnis* , 1 (5), 115-129.
- Puspitasari, F., & Ernawati, E. (2010). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* , 3 (2), 189-215.
- Putri, I. G. (2012). Pengaruh Kebijakan Dividen Dan Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Buletin Studi Ekonomi* , 17 (2), 157-171.
- Reilly, F., & Brown, K. (2000). *Invesment Analysis and Porofolio Management* (6th ed.).
- Rifai, B. (2009). Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik. *Jurnal Hukum* , 16 (3), 396-412.
- Riswandi, B. A. (2006). Permasalahan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN di Indonesia. *Fenomena* , 4 (2), 122-137.
- Rudianto, D. (2012). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT Telkom TBK dengan PT Indosat Tbk Periode 2005-2010. *Prosiding SNAPP : Sosial, Ekonomi, dan Humaniora* , 3 (1), 159-168.
- Santoso, R. (2012). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Merger di Indonesia Tahun 1998-2010*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Santoso, S. (2012). *Panduan Lenkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Septiputri, V. R., & Mutmainah, S. (2013). Dampak Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2007-2011. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 2 (2), 1-9.

- Sitorus, I. J. (2012, Maret). Analisis Peran Komite Audit yang Efektif dan Independensi Dewan Komisaris. *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis* , 662-668.
- Sudantoko, D. (2012). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Prestasi* , 10 (2).
- Sudrajat, & Sukmasari, D. (2011). Pegaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* , 16 (1), 62-72.
- Tiswiyanti, W., Fitriyani, D., & Wiralestari. (2012). Analisis Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi* , 14 (1), 62-66.
- Tjhen, F. T., Saleh, M. H., & Stinjak, T. (2012). Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi Oleh Good Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi Manajemen* , 1 (1), 14-20.
- Tjondro, D., & Wilopo, R. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Business and Banking* , 1 (1), 1-14.
- Ujiyantho, M. A. (2007, Juli 26-28). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi X* .
- Utama, T. A., & Rohman, A. (2013). Pengaruh Corporate Governance Perception Index, Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Saham. *Diponegoro Journal Of Accounting* , 2 (2), 1-9.
- Widianingsih, Y. P. (2011). Pengaruh Keberadaan Dewan Komisaris Terhadap Earnings Management. *Talenta Ekonomi* , 5 (2), 38-51.
- Widjaja, F. P., & Maghviroh, R. E. (2011). Analisis Perbedaan Kualitas Laba Dan Nilai Perusahaan Sebelum Dan Sesudah Adanya Komite Pada Bank-Bank Go Publik Di Indonesia. *The Indonesia Accounting Review* , 1 (2), 117-134.
- Wulandari, N. (2006). Pengaruh Indikator Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Publik di Indonesia. *Fokus Ekonomi* , 1 (2), 120-136.
- Zulaikha, H. R. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris pada BUMN yang Terdaftar di BEI 2009-2011). *Diponegoro Journal of Accounting* , 2 (2), 1-10.